

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media massa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap publik. Pengaruh terhadap publik, seperti dikatakan oleh Lule (2016, h. 9-10) setidaknya bisa terjadi lewat periklanan, siaran berita, hingga hiburan, yang terus membombardir publik dengan pendapat dan informasi dari media massa. Pada titik ini, bisa dikatakan bahwa media massa menjadi acuan utama, bukan hanya sebagai penyampai informasi saja, tetapi ikut berperan dalam suatu konflik. Misalnya saja, pada Perang Dunia II, media massa menjadi bagian penting dalam upaya perang tersebut dengan menyebarkan pemberitaan mengenai perang global itu sehingga mudah diakses ke seluruh dunia dan diterima oleh publik (Bredeson, 2011).

Salah satu media massa yang digunakan dalam menyebarkan berita terkait Perang Dunia II adalah radio, di mana dianggap sebagai media dominan pada 1940-an. Peran radio sebagai media dominan dikatakan oleh seorang wartawan siaran dan sarjana bernama Marvin Kalb bahwa ada 45 juta radio di Amerika Serikat (AS) dan orang-orang mendengarkan radio rata-rata empat setengah jam sehari. Sementara, koran jauh di bawah angka tersebut. Jadi, alat komunikasi terpenting kala itu adalah radio. (Ruane, 2011).

Radio yang kala itu memiliki peran dalam bentuk komunikasi adalah radio BBC. Pengaruh radio BBC, seperti yang dikatakan Briggs dalam penelitian yang dilakukan oleh Gagliarducci, Onorato, Sobbrino, & Tabellini (2017) menyatakan bahwa sejarawan cenderung memiliki pandangan yang sama, di mana BBC dianggap sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan oleh orang-orang Italia selama Perang Dunia II dan memiliki tingkat penyebaran yang tinggi di antara penduduk Italia.

Secara lebih umum, seperti yang dicontohkan oleh Davison (1963, h. 34) bahwa selama Perang Dunia II, radio BBC awalnya hanya berperan dalam mempromosikan pembentukan gerakan perlawanan dengan memberi tahu individu di benua tersebut tahu bahwa mereka tidak sendiri – bahwa ada orang lain yang membagikan opini atau pendapat. Namun, kemudian peran radio BBC berkembang menjadi saluran informasi politik dan teknis yang berguna bagi publik.

Meski radio menjadi media komunikasi terpenting, terutama dalam penyaluran informasi, tetapi bentuk baru komunikasi massa, yakni televisi berhasil mengambil alih perhatian masyarakat dan menggantikan radio setelah Perang Dunia II berakhir (Lule, 2016, h. 350-390). Pergantian tersebut muncul berkat kemampuan televisi dalam memadukan suara dan gambar, berbeda dengan radio yang hanya menghadirkan suara saja. Pada 1946, ada sekitar 17.000 televisi di Amerika Serikat, di mana dalam waktu hampir tujuh tahun, dua per tiga rumah tangga AS memiliki setidaknya satu set. Ada pun Produk Nasional Bruto (GNP) di Amerika Serikat berlipat ganda pada 1950-an dan 1960-an sehingga rumah

merupakan unit konsumen, bersamaan dengan televisi. Menurut Briggs dan Burke (2005), kepemilikan itu membuat masyarakatnya berkontribusi akan ekonomi berbasis konsumen yang berkembang di negara tersebut.

Inovasi dalam teknologi komunikasi membuat kemunculan media televisi menjadi ‘pelari’ yang tercepat dalam suatu penyiaran (Bredeson, 2011). Pemberitaan mengenai perang-perang berikutnya, mulai dari *Cold War* atau Perang Dingin (1947-1991), *Vietnam War* atau Perang Vietnam (1955-1975), *Gulf War* atau Perang Teluk I dan 2 (1990-1991 dan 2003), dan konflik perang lainnya menjadikan sejumlah perusahaan penyiaran, mulai dari *National Broadcasting Company* (NBC), *British Broadcasting Corporation* (BBC), dan *Cable News Network* (CNN) sebagai penyiar paling berpengaruh dalam aktivitas perang (Gilboa, 2005).

Perusahaan penyiaran NBC, BBC, CNN, atau media-media massa lainnya tentu bukan hanya mengabarkan pemberitaan akan konflik perang. Media massa memiliki peran untuk menyiarkan setiap kasus yang melibatkan kepentingan banyak orang, termasuk krisis. Krisis yang terjadi di Zimbabwe misalnya. Penting untuk dicatat bahwa sejumlah peneliti pun tidak yakin kapan sebenarnya krisis Zimbabwe dimulai. Namun, beberapa studi menyatakan bahwa krisis ini terjadi selama periode 1999 hingga 2010 (Matsilele, 2013).

Awal mula terjadinya krisis Zimbabwe ketika Presiden Robert Mugabe dikritik karena menggunakan kekejaman dan melakukan penyuapan demi mempertahankannya kekuasaannya. Kesalahan Mugabe dalam sektor pertanian menjadi malapetaka perekonomian di Zimbabwe (Petroff, 2017). Alhasil, krisis

yang terjadi selama dua dekade belakangan mengakibatkan berbagai hal, yakni kekerasan politik, kemerosotan ekonomi, resesi ekonomi yang ditandai dengan rekor tingkat pengangguran, kekurangan mata uang lokal dan asing, membengkaknya hutang dalam dan luar negeri, inflasi melonjak, dan sebagainya (Mare, 2009).

Krisis Zimbabwe, salah satu yang pernah menjadi krisis terbesar di dunia ini tidaklah luput dari pemberitaan media Afrika dan global. Namun, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Moyo (2007) berjudul *'Alternative Media, Diasporas and The Mediation of The Zimbabwe Crisis'*, bahwa media massa di selatan Afrika ini kurang mendapatkan tempat. Bahkan, negara mengontrol satu-satunya televisi yang ada dan empat stasiun radio di negara tersebut. Kontrol negara atas media telah diperkuat dengan dikeluarkannya undang-undang yang semakin membatasi ruang demokrasi (Moyo, 2007). Pembatasan demokrasi di Zimbabwe dalam situasi krisis politik dan ekonomi menyebabkan kaburnya profesi jurnalis. Padahal seharusnya kebebasan pers tidaklah boleh dibungkam oleh siapa pun, termasuk pimpinan di level tertinggi pemerintahan.

Meski demikian, para wartawan hingga warga Zimbabwe tidak tinggal diam, di mana sejumlah situs media *online* didirikan sejak 2003, seperti *Newzimbabwe.com*, *Zimdaily.com*, *Zimonline.co.za*, dan *Zimbabwejournalists.com* (Moyo, 2007). Peran media massa dalam menyuarakan kebenaran dan pendapat hingga menyampaikan informasi kepada publik kembali terlihat. Para wartawan media Zimbabwe kembali menjalankan profesinya tanpa harus diatur oleh negara.

Setidaknya, apa yang dialami oleh media massa di Zimbabwe merupakan cerminan atas perkembangan pers yang terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara. Misalnya saja Myanmar. Media cetak, penyiaran, dan *online* di Myanmar telah mengalami sensor dan regulasi ketat sejak kudeta diktator Burma 1962 (Lamung, 2018). Konstitusi memberikan kebebasan berbicara dan pers; akan tetapi, dalam praktiknya pemerintah melarang penggunaan hak-hak ini. Pelarangan yang terjadi bahkan membuat Myanmar menempati peringkat 144 terkait kebebasan pers, sebagai akibat dari perubahan politik di negara itu (Press Freedom Index, 2015).

Perubahan politik yang terjadi membuat kebebasan media berita di Myanmar telah terancam, terutama pada masalah sensitif politik, Hak Asasi Manusia (HAM), berita perang, hingga masalah konflik-perdamaian yang masih terbatas dalam pelaporannya (Lamung, 2018). Misalnya saja, pelaporan berita mengenai krisis Rakhine-Rohingya masuk Myanmar yang mengakibatkan sejumlah jurnalis ditangkap dan dipenjarakan. Hal itu membuat para jurnalis kehilangan kepercayaan diri dan kebebasannya dalam melaporkan informasi akan masalah sensitif politik di negara bagian Rakhine. Padahal, sebagai transisi demokrasi, negara tentu perlu mempraktikkan kebebasan berekspresi bagi media.

Kebebasan media berita disebutkan oleh Kovach & Rosenstiel (2001, h. 61-62) bahwa kurangnya sensor memungkinkan media bertindak sebagai peran pengawas atas pemerintah sehingga menjadikan pemerintah lebih bertanggung jawab dan responsif. Apalagi, peran media internasional dan lokal tentu sangatlah penting ketika krisis besar yang menimpa warga Rohingya di Myanmar. Ketika krisis itu tengah terjadi, Lamung (2018) dalam penelitiannya memperlihatkan

bahwa kala itu tidak ada satu pun jurnalis yang melakukan liputan berita hingga 2017 silam, setidaknya selama beberapa tahun sejak krisis itu terjadi. Padahal, bila dilihat, krisis Rohingya di Myanmar masih berlangsung hingga saat ini.

Selain krisis Rohingya di Myanmar, bila mundur beberapa tahun ke belakang, maka peneliti ingin sedikit menggambarkan peranan penting media dalam aspek lain, yakni kekuasaan. Pertama di Filipina, gerakan *People Power*, yakni gerakan untuk menjatuhkan posisi Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. Status sebagai Presiden pada 1986. Mengutip dari pemberitaan yang dilakukan *Tirto.id* (Hasan, 2018), Marcos dipaksa untuk melepaskan jabatannya karena dihantam gelombang demonstrasi rakyat yang menamakan diri sebagai Revolusi EDSA. Kala menjabat, pemerintahan Marcos memegang penuh kontrol militer, termasuk mengekang kebebasan pers dan pendapat hingga akhirnya menutup izin pengoperasian media pengkritik. Namun, tepat pada 25 Februari 2020, ratusan ribu demonstran menyemut menuju Jalan EDSA. Malam harinya, Marcos pun menyerah dan resmi lengser dari posisinya.

Kedua di Thailand, di mana media berperan dalam peristiwa Mei yang terjadi pada 1992. Kala itu, rakyat Thailand berhasil menggulingkan pemerintahan Jenderal Suchinda Kraprayoon. Suchinda mundur hingga akhirnya pemilu-pemilu selanjutnya menunjukkan kembalinya pemerintahan demokrasi.

Ketiga, di tempat berbeda, di Indonesia, gelombang demonstran dari sejumlah kalangan mahasiswa berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto pada 1998 (McCargo, 1999). Ketika era pemerintahan Soeharto, media massa diwarnai oleh kekuatan dan dominasi penguasa, termasuk dalam hal pemberitaan dan

penyampaian informasi kepada publik. Peran media kala itu diharuskan mendukung segala kebijakan dan langkah pemerintah Indonesia. Bila tidak seirama, maka ancaman pembredelan pun muncul bagi media tersebut. Alhasil, media hanyalah perpanjangan tangan dari kepentingan para penguasa. Padahal, menurut Neumann (1998), kebebasan memiliki peranan penting di Asia Tenggara, khususnya dalam proses liberalisasi politik yang berkaitan dengan kemunculan pers yang lebih terbuka dan kritis.

Berakhirnya kekuasaan pemerintahan Soeharto atau dikenal dengan istilah Orde Baru selama lebih dari tiga dekade ditandai kebebasan yang sebelumnya dibungkam, termasuk media massa. Usai jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998, media memperoleh kebebasan dari kontrol dan pembredelan yang dulu kerap terjadi semasa pemerintahan Orde Baru. Presiden ke-3 Republik Indonesia Habibie, pengganti Soeharto, memahami bahwa reformasi adalah kunci kelangsungan politik. Sebagai bagian dari proses itu, pemerintah dengan cepat mencabut hampir semua pembatasan pers yang diyakini Habibie mampu meredakan ketegangan.

Pencabutan pembatasan pers terlihat dari jumlah media di Indonesia pasca-1998 atau dikenal pasca-Reformasi yang terus meningkat. Bahkan, meningkatnya jumlah media terwujud dari salah satu jenisnya, yakni media cetak yang bertambah signifikan dari 289 surat kabar harian menjadi 1.687 harian pada awal 2005 (Manan, 2011, h. 1–2). Kebebasan yang muncul akhirnya juga menjadikan media bebas untuk mengungkap berbagai realitas yang sebelumnya tergolong begitu sensitif, seperti korupsi hingga pelanggaran HAM. Kemunculan pers juga

kini lebih terbuka akibat adanya konflik maupun krisis. Seperti yang dikatakan oleh Neumann (1998) bahwa krisis juga menciptakan peluang perubahan sosial dan politik yang positif, termasuk kebebasan pers yang lebih besar.

Selain memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi atau berita mengenai konflik atau krisis, media massa juga memiliki peran sebagai pembentuk makna (Lippmann, 1998). Penafsiran makna dalam media massa tentu bisa saja mengarahkan atau mengubah pemikiran seseorang akan realitas tersebut. Kemampuan media massa dalam menciptakan realitas dapat dimanfaatkan untuk menciptakan opini publik dalam berpendapat yang tentu tidak terlepas dari perannya yang mampu memengaruhi pola pikir (Alfaritsi, Anggraeni, & Fadhil, 2020).

Pola pikir yang kemudian terbentuk, dalam penelitian Zengeni (2020) memperlihatkan bahwa meski media dan opini publik secara independen dapat memengaruhi pembuat kebijakan untuk mengikuti tindakan tertentu, tapi nyatanya dalam banyak kasus, mereka tunduk pada elit politik. Dari sudut pandang ini, media memiliki bentuk pengaruh yang agak kurang independen, bertindak hanya sebagai corong pejabat pemerintah, beroperasi untuk memobilisasi publik untuk mendukung kebijakan masing-masing.

Alhasil, hubungan antara politik dan media pun kian erat, apalagi bila politik ikut masuk dalam peta bisnis media. Menurut Tapsell (2017, h. 117-118), ada tiga argumen utama yang ditemukannya mengenai media dan politik di Indonesia. Pertama, pemilik media lebih aktif di panggung politik dan lebih cenderung memengaruhi liputan politik dan pemilu. Kedua, pemilik media

memiliki kekayaan lebih besar. Ketiga, perusahaan media lebih dinasti dengan banyak anak pemilik di dalamnya.

Maka darinya, kekuasaan tak jarang bersentuhan langsung dengan media massa demi berbagai kepentingan politik. Bahkan, di antara para politisi, ada pula penguasa media yang turut menjadi bagian dari partai-partai tersebut. Bahayanya adalah media yang justru ikut terlibat dalam kekuasaan dan mengabaikan perannya sebagai pengawas. Misalnya saja Partai Perindo dan Grup MNC (Media Nusantara Citra) yang dimiliki oleh satu orang yang sama, Hary Tanoesoedibjo. Demi memperkenalkan partai politiknya, HT pun tak jarang memanfaatkan infrastruktur komunikasinya, dalam hal ini media massa.

Lain hal, misalnya dicontohkan oleh Tapsell (2017) adalah media Dahlan Iskan secara teratur meliput keterlibatan perusahaan Aburizal Bakrie dalam bencana semburan lumpur Jawa Timur. Selain itu, contoh lainnya adalah perusahaan-perusahaan Bakrie menghasilkan paparan terhadap perusahaan Surya Paloh di Afrika dan hubungannya dengan Presiden Jokowi atau media Surya Paloh meliput persidangan korupsi Dahlan Iskan. Dari situlah, terlihat bahwa pada Pemilihan Presiden 2014, setelah NasDem bersekutu dengan Joko Widodo, MetroTV mengirimkan wartawan ke mana pun ia pergi, sementara liputan kampanye Prabowo Subianto begitu minimal dan negatif. Hal ini termasuk dengan yang dilakukan oleh Dahlan Iskan, pemilik Jawa Group, juga secara eksplisit mendukung Jokowi. Dukungannya sangat penting untuk melawan koran tabloid 'kampanye hitam' Obor Rakyat, yang memuat materi yang mencemarkan nama baik yang menyatakan Jokowi adalah seorang Cina-Kristen.

Alhasil, independensi media terancam hingga akhirnya memperburuk liputan berita partisan. karena pengaruh pemilik media yang cukup besar ke ruang redaksi. Keberpihakan para pemilik media tentu berdampak pada posisi redaksi dalam menayangkan berita. Kepemilikan media dinilai sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan. Pasalnya, dari media massa-lah, opini publik dapat terbentuk.

Masalah kepemilikan media dan kekuasaan menjadi cerminan bahwa relasi antara media dan pemilu di Indonesia misalnya, tidaklah lepas dari posisi media yang tidak netral dalam politik. Peristiwa - peristiwa utama mengenai Pemilihan Presiden yang kemudian dikemas oleh media massa dapat menjadi alat dominasi yang bersifat eksklusif di lingkungan media massa sendiri sehingga membentuk sebuah wacana. Sejumlah wacana pun diciptakan sedemikian rupa secara halus dan tidak kentara, padahal di dalamnya terbingkai banyak kepentingan yang berlangsung. Wacana yang dimunculkan dalam media massa memiliki dua aspek penting, yakni teks dan konteks. Teks, dalam hal ini, merupakan bahasa yang dipergunakan dalam merepresentasikan maksud dari pembuat wacana.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Krisis adalah peristiwa tak terduga yang berdampak pada masalah seperti kelangsungan hidup, kredibilitas, dan reputasi (Dalei & Mishra, 2009). Setidaknya, krisis dapat menciptakan tiga ancaman, yakni keamanan publik, kerugian finansial, dan hilangnya reputasi (Coombs, 2010). Ketiga ancaman yang

muncul, seperti dikatakan Umeogu & Ifeoma (2012), menggambarkan krisis layaknya kematian sehingga tidak dapat dihindari. Alhasil, krisis pun harus dihadapi dan ditanggapi dengan tepat sehingga tidak menimbulkan banyak dampak.

Umeogu & Ifeoma (2012) menyebut bahwa apa yang disebut dengan jurnalisme krisis adalah pemberitaan media massa mengenai pemberontakan, protes, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam, hingga ulah manusia lainnya. Bahkan, Ketika jurnalis melaporkan kejadian-kejadian dalam situasi krisis yang sejalan dengan objektif dan akurat, maka hal itu disebut jurnalisme krisis dan karenanya dimaksudkan untuk terlihat seperti orang sadis atau pendukung krisis (Umeogu & Ifeoma, 2012). Abraham Lincoln pernah menuliskan *quote* berikut: *We live in the midst of alarms, anxiety beclouds the future; we expect some new disaster with each newspaper we read.* Artinya bahwa tak sedikit orang yang tentu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diketahui, seperti bencana.

Misalnya, bencana Covid-19 yang muncul di awal 2020 begitu membuat khawatir banyak orang. Di tengah pandemi Covid-19, para jurnalis pun harus siap dan tetap dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang objektif sehingga melengkapi jawaban atas rasa ingin tahu masyarakat. Layaknya petugas medis, bahkan jurnalis juga wajib berada di garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dengan nyawa taruhannya. Informasi yang disampaikan tentu bukan hanya kasus positif, melainkan Bukan hanya menyampaikan pemberitaan mengenai jumlah korban meninggal, tapi jurnalis juga harus menginformasikan cara-cara penularan virus corona hingga informasi-informasi penting lainnya.

Selanjutnya, itulah yang akan menjadi fokus penelitian penulis, yakni mengamati bagaimana cara media massa di Indonesia bertindak ketika menghadapi Covid-19 dengan pendekatan kualitatif dan metode Analisis Wacana Kritis.

Terkait dengan latar belakang masalah mengenai wacana media dalam pemberitaan krisis yang telah dirumuskan, maka peneliti menghimpun beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam memunculkan suatu kebaruan. Selanjutnya, penemuan kebaruan yang dianggap penting akan diangkat pada penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Alfaritsi, Anggraeni, & Fadhil (2020), Muhaemin, Darsono, Cholidah, & Suryana (2020), Triyono & Rusdiana (2011), Amer (2017), Klimava (2016), dan Tabe & Fieze (2018) sama-sama meneliti bagaimana suatu wacana berperan dalam pemberitaan krisis di media massa. Fokus penelitian Alfaritsi, Anggraeni, & Fadhil (2020) dan Muhaemin, Darsono, Cholidah, & Suryana (2020) mengenai krisis Covid-19 di Indonesia.

Sementara, fokus-fokus penelitian lainnya adalah krisis yang terjadi di negara-negara lain. Penelitian yang diamati oleh Triyono & Rusdiana (2011) misalnya, yakni mengenai krisis politik yang terjadi di Thailand. Selain itu, fokus penelitian Amer (2017) adalah Perang Gaza 2008-2009, fokus penelitian Klimava (2016) adalah krisis yang terjadi di Ukraina. Lain hal dengan penelitian Tabe & Fieze (2018) yang mencermati krisis Anglophone di Cameroon pada *headlines* surat kabar. Terakhir, ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shalvee & Sambhav (2020) yang juga membahas bagaimana peran media massa saat krisis Covid-19. Namun, penelitiannya tidak menggunakan Analisis Wacana seperti

yang dilakukan oleh penelian-penelitian lainnya. Peneliti pun tetap menjadikannya sebagai layer kedua dan bahan rujukan karena sama-sama membahas peran media saat krisis.

Ketika membahas peran media dalam suatu pemberitaan, Alfaritsi, Anggraeni, & Fadhil (2020) serta Klimava (2016) sepakat bahwa di era saat ini, media memiliki kekuatan utama dalam mengkonstruksikan realitas hingga mengemasnya menjadi sebuah isu. Kemudian, isu-isu yang berhasil dikemas menjadi sebuah berita menjadi perbincangan publik. Saussure dalam penelitian Alfaritsi, Anggraeni, & Fadhil (2020) berpendapat bahwa pandangan dan persepsi seseorang akan realitas itu dikonstruksi oleh kata maupun tanda yang dipakai dalam suatu konteks sosial. Peneliti sepakat akan hal itu, pasalnya media massa yang menentukan suatu kebenaran. Meski demikian, pembaca berita alias publik memiliki tugas yang nyatanya lebih berat, yakni menyikap pemberitaan hingga mampu menyaring berita yang disajikan hingga mendekati suatu kebenaran.

Kebenaran itulah yang menjadi prinsip dalam media massa. Selain menyampaikan informasi, Triyono & Rusdiana (2011) juga ikut memaparkan peran media dalam suatu pemberitaan bahwa media adalah tulang punggung demokrasi, penyedia informasi bagi elit maupun masyarakat, dan membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat hingga akhirnya menjadi penyalur dalam dialog.

Alih-alih sebagai penyedia informasi hingga penyalur terjadinya dialog, media juga memiliki peran sebagai pengawas atau *watchdog* yang artinya menjalankan fungsi kontrol sosial. Peran media sebagai pengawas dalam pandemi

Covid-19 pun menjadi sangat penting. Media haruslah kritis dan tidak hanya sekadar memberikan laporan kebijakan terkait penanganan dan pemulihan Covid-19 di Indonesia, melainkan melaporkan sejumlah hal yang tersembunyi, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dinilai berkuasa, termasuk pemerintah sekalipun.

Namun, Alfaritsi, Anggraeni, & Fadhil (2020) justru menganggap bahwa tidak ada media massa yang sepenuhnya netral. Bahkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyono & Rusdiana (2011) juga memperlihatkan bahwa media massa yang semula berperan sebagai agen penyelaras dapat mengalami pergeseran. Media massa tidak lagi berperan sebagai penyedia informasi yang jujur dan objektif, terutama ketika krisis terjadi. Alhasil, seiring dengan berkembangnya krisis, media justru berangsur memihak pada salah satu kelompok yang memiliki kekuatan atau dapat dikatakan tidak netral.

Ketika membahas perihal netralitas, memang seharusnya seluruh media memiliki prinsip tersebut, yakni netral dan tidak berpihak pada siapa pun. Namun, kenyataannya peneliti juga beranggapan bahwa tidak ada media yang netral. Setidaknya, kalau bisa disimpulkan ketidaknetralan tersebut terlihat dari posisi dan cara media membingkai sebuah isu-isu publik tersebut. Media tentu punya pengaruh yang besar untuk menentukan apa-apa saja yang ingin dipikirkan oleh si audiens. Akhirnya, muncul apa yang disebut dengan teori Agenda Setting.

Teori Agenda Setting yang diperkenalkan Maxwell McCombs & Donald Shaw menjelaskan bahwa media membentuk persepsi khalayak mengenai segala hal yang dianggap penting oleh media (Griffin, 2011, h. 378). Isu yang dianggap penting akan lebih ditekankan dan disajikan kepada khalayak. Maka dari itu,

media memiliki pengaruh yang kuat, terkait dengan kemampuannya dalam mereproduksi aspek sosial dan budaya masyarakat lewat publikasi informasi. Media sendiri memiliki kemampuan dalam memindahkan wacana dari agenda pemberitaan menjadi agenda publik.

Meski demikian, kenyataannya adalah McCombs & Shaw tidak mengatakan bahwa jurnalis maupun para produser media massa dengan sengaja membuat konten dalam upaya memengaruhi opini khalayak (Griffin, 2011, h. 378). Pasalnya, tak dimungkiri bahwa sebagian media masih memiliki reputasi yang baik dalam hal independensi dan keadilan. Namun, McCombs dan Shaw melihat para profesional berita memberikan isyarat tentang petunjuk di mana para audiens dapat memusatkan perhatian mereka sehingga kita menilai sesuatu penting berdasarkan apa yang dianggap media penting: *We judge as important what media judge as important* (Griffin, 2011, h. 378).

McCombs & Shaw meyakini bahwa apa yang diagendakan oleh media berkorelasi terhadap agenda pemilih, di mana konten media massa (dalam hal ini televisi) dapat memengaruhi persepsi khalayak atau disebut dengan Teori Kultivasi (Griffin, 2011, h. 370). Namun, seperti yang dikatakan kritikus Teori Kultivasi, korelasi tersebut bukanlah penyebabnya (Griffin, 2011, h. 380). Kemungkinannya adalah peliputan yang dilakukan media cetak dan media televisi hanya mencerminkan kekhawatiran publik yang sudah ada. Atau, peliputan oleh media massa tersebut merupakan refleksi dari apa yang diharapkan oleh publik. Di dalam hubungan antara agenda pemilih dan agenda media, liputan media sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar (Griffin, 2011, h. 380).

Alhasil, liputan yang kerap dilakukan oleh jurnalis akan memperlihatkan seperti apa idealisme. Sebagai seorang jurnalis, idealisme mereka akan ‘terpasung’ ketika menjadi bagian dalam sebuah media, yang wajib menyalurkan pemberitaan yang mereka lakukan sesuai dengan kebijakan redaksi. Namun, seorang sastrawan sekaligus jurnalis senior, Goenawan Mohamad, pernah menyampaikan bahwa dalam pemberitaannya, media tidak harus netral. Satu hal terpenting menurut Goenawan adalah media tidak memfitnah. Menurut Mohamad, bila media menyebarkan fitnah, maka yang terluka adalah seluruh bangsa. Peralnya, bukan hanya manusia yang dirusak, tetapi akal manusia dan kejujuran (Tempo, 2014).

Maka darinya, ketika membahas pemberitaan di media massa tentu tidak terlepas dari suatu wacana yang sarat kepentingan. Menurut Fairclough (1989, 2001, 2003), Fowler (1991), van Dijk (1997, 1998a, 1998b), dan Richardson (2007) dalam penelitian yang dilakukan oleh Amer (2017) menemukan bahwa wacana pada media terdiri dari teks (relatif berita) dan proses pembentukan dan produksi teks. Wacana di media jelas merefleksikan kepentingan ideologi dan sikap mereka yang berkuasa, seperti elit, politisi, jurnalis, dan lainnya. Setidaknya, kehadiran media, dikatakan oleh Dosi (2012, h. 17-18) tidak selalu diperlakukan dengan pola-pola relasi yang sederhana. Media dapat menjadi suatu wahana untuk mendominasi, menguasai, mengarahkan pikiran publik, merekonstruksikan realitas, dan menanamkan ideologi.

Media, dalam membentuk suatu wacana pun, pada saat bersamaan juga turut memproduksi, mereproduksi, dan mendistribusi berbagai macam simbol

bagi masyarakat. Maka darinya, media adalah salah satu wadah wacana yang dianggap memiliki kekuatan sehingga menjadi perhatian bagi studi kritis, termasuk studi tentang wacana. Lewat wacana media itulah yang kemudian memiliki peran untuk mereproduksi berbagai kekuasaan. Selain itu, media juga dilihat sebagai suatu fenomena bahasa, sosial budaya, dan politik.

Kemudian, ada beberapa celah permasalahan atau *gap* yang peneliti temukan usai menjabarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian. Pertama, penelitian yang diamati oleh Alfaritsi, Anggraeni, & Fadhil (2020) dan Tabe & Fieze (2018) tidak menjabarkan secara rinci mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam mengerjakan Tinjauan Pustaka. Penelitian yang dilakukan hanyalah sebatas menjabarkan judul-judul pada penelitian terdahulu yang digunakan. Padahal seharusnya dari situ, ia dapat menemukan *gap* penelitian.

Kedua, dari sisi teori, penelitian yang dilakukan oleh Alfaritsi, Anggraeni, & Fadhil (2020), Muhaemin, Darsono, Cholidah, & Suryana (2020), dan Shalvee & Sambhav (2020) tidak menjabarkan secara jelas teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian yang mereka lakukan. Kemudian, Muhaemin, Darsono, Cholidah, & Suryana (2020) tidak menjabarkan seperti apa kategori pada *sample* yang digunakan, karena hanya menyebutkan bahwa *sample* yang dipilih harus sesuai dengan ideologi dan menarik. Tidak ada elemen-elemen khusus yang menggambarkan mengenai kesesuaian dengan ideologi dan menarik bagi publik.

Ketiga, penelitian terdahulu hanya mengamati surat kabar dan media *online* saja. Maka dari itulah, penelitian mengenai peran media massa dalam wacana pemberitaan krisis Covid-19 di media televisi baru dilakukan oleh peneliti. Namun, peneliti hanya membatasi dua media massa yang digunakan sebagai subjek penelitian. Alasannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh bahwa kedua media televisi tersebut, yakni MetroTV dan tvOne merupakan media yang lebih banyak menayangkan berita. Ada pun berita yang ditayangkan secara intens adalah wabah Covid-19 di Indonesia. Bahkan, tak jarang, pemberitaan dilakukan melalui program *Breaking News* di televisi. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia pada 2017, setidaknya MetroTV dan tvOne masuk dalam dua dari tiga program berita yang banyak ditonton oleh publik.

Keempat, belum ada penelitian yang berfokus terhadap wacana pemberitaan mengenai kebijakan publik di masa krisis, khususnya Covid-19. Bahkan, penelitian ini juga meneliti seperti apa peran media hingga ideologinya di masa krisis Covid-19. Maka darinya, peneliti pun memastikan bahwa penelitian yang selanjutnya dilakukan ini merupakan suatu hal yang baru. Apalagi, penelitian ini sekaligus melihat dari dua sisi media massa televisi yang berbeda untuk menemukan komparasi di antara keduanya.

Ada pun berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana MetroTV dan tvOne mengkonstruksi wacana realitas sosial pada pemberitaan wabah Covid-19, terutama berita mengenai kebijakan publik?
2. Bagaimana peran MetroTV dan tvOne dalam pemberitaan krisis Covid-19 di Indonesia, terutama berita mengenai kebijakan publik?
3. Bagaimana ideologi MetroTV dan tvOne dalam pemberitaan krisis Covid-19 di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, poin utama yang menjadi tujuan penelitian adalah mencermati wacana pemberitaan pandemi Covid-19 pada dua media televisi di Indonesia, yakni MetroTV dan tvOne. Selanjutnya, peneliti ingin melihat peran, sikap, posisi, hingga ideologi kedua media massa dalam mewacanakan pemberitaan mengenai kebijakan publik pada masa krisis Covid-19 yang terjadi pada Maret 2020 – September 2020.

Alasan mengapa bulan tersebut yang dipilih karena Maret 2020 merupakan awal di mana kasus pertama Covid-19 muncul di Indonesia. Sementara itu, selama enam bulan ke depan usai kasus pertama, pemerintah pun sibuk mengatur dan menginformasikan kebijakan publik untuk masyarakat di masa krisis Covid-19 yang tentunya diberitakan oleh stasiun televisi berita MetroTV dan tvOne.

1.4 Signifikansi Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan, yakni:

1. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti di bidang ilmu komunikasi dan kajian media yang ingin meneliti peran media massa dalam pemberitaan mengenai krisis atau konflik menggunakan Analisis Wacana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal memperkaya literatur penelitian mengenai wacana media massa, terutama ketika masa krisis. Tentunya, penelitian ini sekiranya juga dapat mendorong para peneliti di masa datang untuk memperbanyak kajian terkait wacana media massa, apalagi di Indonesia itu sendiri.
2. Manfaat sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan cara-cara media massa melakukan pemberitaan, terutama terkait wacana media massa dalam wacana pemberitaan krisis. Dengan gambaran yang diberikan, diharapkan masyarakat bisa kembali memilih dan menyaring informasi seperti apa yang ingin diserap dan kemudian dibagikan kepada orang lain, yang tentunya adalah berita bermanfaat. Hal ini akhirnya mampu membuat masyarakat menjadi lebih *aware* akan pemberitaan Covid-19 dan tidak membagikan berita hoaks.
3. Manfaat praktis. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi media massa di Indonesia. Hal ini kiranya dapat membuat media menjadi lebih baik dalam memberitakan pemberitaan seperti krisis Covid-19 atau kasus – kasus serupa ke depannya. Selain itu, sekiranya penelitian

ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk berpikir lebih kritis akan isu-isu yang terjadi selama krisis.

